

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan skripsi penulis yang berjudul: *Otonomi Daerah Aceh: Sejarah dan Latar Belakangnya (1970-005)*. Metode penelitian yang digunakan skripsi ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah suatu proses menguji menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008, hlm. 39). Menurut Ismaun (2005, hlm. 48-50) dalam penelitian sejarah terdapat beberapa langkah yaitu heuristik, interpretasi, kritik sumber dan histiografi.

##### 1. Heuristik

Carrad dan Gee (dalam Sjamsuddin, 2012, hlm 67) “heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, evidensi sejarah”. Untuk mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian, penulis menggunakan sumber-sumber berupa buku, skripsi jurnal dan data lainnya. Dalam mencari sumber penulis sudah mengunjungi beberapa perpustakaan yang ada dikawasan Bandung diantaranya Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan Batu Api dan Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Daerah Provinsi Jawa Barat. Penulis juga mengikuti seminar untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang bersangkutan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Selain mengunjungi perpustakaan penulis juga mengunjungi beberapa *website* dan *electronic book (ebook)* yang dapat membantu penulis dalam melakukan sumber sejarah.

##### 2. Kritik Sumber

Kritik sumber dapat dibagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal ialah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri

untuk mengetahui apakah suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu (Sjamsuddin, 2012. Hlm, 105). Dapat dikatakan kritik eksternal adalah kegiatan untuk membuktikan otentisitas suatu sumber. Dalam melakukan kritik eksternal penulis melakukan pemilihan terhadap sumber-sumber yang digunakan penulis apakah relevan dengan penelitian yang penulis kaji. Apakah mencantumkan nama pengarang, tahun terbit, dan tempat penerbitnya serta apakah sumbernya telah direvisi atau belum. Menurut Sjamsuddin (2012, hlm,112) “kritik internal ialah menekankan aspek dalam yaitu isi dan sumber. Jadi dapat dikatakan kritik internal ialah kegiatan mengevaluasi isi dari sumber sejarah apakah isi sumber sejarah itu dapat diandalkan atau tidak. Kritik internal yang dilakukan oleh penulis adalah dengan membaca seluruh sumber sejarah kemudian membandingkannya dengan sumber yang lain. Jika terdapat perbedaan antara satu sumber dengan sumber lainnya maka, penulis akan mencari sumber-sumber lainnya untuk membuktikan kebenaran isi sumber tersebut. Isi sumber sejarah yang penulis evaluasi adalah berupa fakta-fakta tunggal seperti nama orang, tempat, waktu serta peristiwa apa yang terjadi.

### 3. Interpretasi

Interpretasi adalah kegiatan memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dengan cara menghubungkan-hubungkannya. Pada tahap ini penulis menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah penulis temukan selama penelitian ini.

### 4. Historiografi

Tahapan akhir dari penelitian sejarah adalah historiografi. Pada tahap ini penulis menyajikan fakta-fakta yang telah dihubungkan menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan teknik penulisannya menggunakan sistem *American Psychological Association* (APA). Alasan penulis menggunakan sistem APA karena sesuai dengan peraturan yang digunakan Universitas Pendidikan Indonesia dalam kaidah penulisan karya ilmiah.

## 3.2 Persiapan Penelitian

Pada tahapan ini, penulis melakukan beberapa persiapan sebelum melakukan penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan penulis sebelum melakukan penelitian adalah pertama, melakukan pengajuan tema penelitian, penyusunan rancangan penelitian dan proses bimbingan.

### 3.2.1 Pengajuan Penelitian

Langkah terpenting untuk melakukan sebuah penelitian adalah dengan mengajukan tema penelitian. Awal ketertarikan penulis mengkaji mengenai Aceh dan otonomi daerah beserta dinamika didalamnya ketika peneliti membaca buku karangan Dr. Husaini M. Hasan yang berjudul *Dari Gunung Halimon ke Swedia*. Dari buku tersebut peneliti dapat mengetahui gambaran, sejarah, serta kondisi Aceh dari zaman penjajahan Belanda hingga dimulainya konflik di Aceh dan dijadikannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), hingga berdirinya organisasi yang ingin Aceh lepas dari wilayah NKRI yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), walaupun pada akhirnya konflik dan dinamika yang terjadi di Aceh tersebut di selesaikan dengan perjanjian damai, atau lebih dikenal dengan *MoU Helsinki* yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2005, yang salah satu isi di dalamnya adalah pemberian hak istimewa atau lebih dikenal dengan Otonomi daerah. Selain alasan diatas, keterkaitan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai otonomi daerah Aceh karena peneliti merupakan mahasiswa yang berasal dari Aceh, sehingga sangat menarik minat dalam melakukan penelitian.

Setelah mengumpulkan literatur-literatur mengenai Aceh dan Otonomi Daerah, peneliti menyusun proposal penelitian yang memfokuskan mengenai pemikiran Otonomi daerah Aceh. Judul proposal yang peneliti tulis adalah "*Otonomi Daerah Aceh: Sejarah dan Latar Belakangnya (1970-2005)*". Sebelum mendaftarkan judul penelitian, penulis berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ibu Murdiyah selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Proposal Karya Ilmiah.

Setelah berkonsultasi dan merasa yakin lalu peneliti mendaftarkan judul penelitian ke Tim Pertimbangan Proposal Skripsi untuk diseminarkan.

### 3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian

Setelah peneliti mendaftarkan proposal ke TPPS, dengan judul “*Otonomi Daerah Aceh: Sejarah dan Latar Belakangnya (1970-2005)*” pada tanggal 24 Juli 2019 peneliti melakukan seminar pra-rancangan skripsi di Laboratorium Departemen Pendidikan Sejarah. Namun pada seminar ini peneliti tidak tampil dan tidak mempresentasikan proposal penelitian dikarenakan calon pembimbing berhalangan hadir, hingga dari panitia TPPS menyarankan langsung untuk bertemu dan konsultasi dengan Calon Pembimbing I yaitu Bapak Agus mulyana, dan Bapak Wawan Darmawan selaku Pembimbing II dengan catatan membuat laporan hasil bimbingan dan diserahkan kepada jurusan. Setelah seminar proposal dilaksanakan peneliti menemui calon dosen Pembimbing I untuk melaksanakan bimbingan pada pertemuan tersebut Pembimbing I kala itu bersedia untuk membimbing penulisan skripsi ini, dengan catatan merubah judul Skripsi yang pada awalnya “*Politik Identitas: Perjuangan Rakyat Aceh dalam Mendapatkan Hak Otonomi Daerah (1970-2005)*” menjadi “*Otonomi Daerah Aceh : Sejarah dan Latar Belakangnya (1970-2005)*” dan memberikan tugas untuk melanjutkan Bab I. setelah menghampiri dosen Pembimbing I untuk melakukan bimbingan, peneliti menuju Pembimbing II meminta melanjutkan penulisan Skripsi, setelah melalui negoisasi yang penajng akhirnya peneliti diberikan restu untuk melanjutkan pembahasan yang telah diajukan dalam Proposal Skripsi. Kemudian keluarlah surat keputusan dengan Nomor: 2717/UN40A.2/DL/2019 yang menyatakan dalam proses dan penulisan skripsi ini akan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Wawan Darmawan, M. Hum.

### 3.2.3 Proses Bimbingan

Bimbingan merupakan suatu kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh penulis dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Pada proses bimbingan ini penulis berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi ketika melakukan penelitian dan melaporkan *progres* pengerjaan *draft* skripsi yang telah dibuat. Proses bimbingan dilakukan bab demi bab secara intensif ada juga yang dilakukan langsung diserahkan beberapa bab.

Setiap akan melakukan bimbingan penulis terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada dosen pembimbing melalui handphone untuk menjadwalkan waktu yang cocok agar proses bimbingan berjalan lancar. Proses bimbingan pertama, dilakukan penulis pada tanggal 25 Juli 2019 kepada dosen pembimbing I yaitu Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum. Dari hasil bimbingan ini penulis disarankan untuk merubah judul penulis dari “*Politik Identitas: Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Mendapatkan Hak Otonomi Daerah (1970-2005)*” menjadi “*Otonomi Daerah Aceh: Sejarah dan Latar Belakangnya*”. Dosen pembimbing I berpendapat judul skripsi peneliti harus dirubah dengan alasan fokus dari penelitian skripsi ini lebih jelas dengan di konkritkan melalui judul yang lebih jelas yang pada pembahasannya juga membahas sejarah dan latar belakang Aceh dalam mendapatkan hak otonomi daerah setelah melalui konflik yang berkepanjangan. Sementara itu proses bimbingan dengan dosen pembimbing II yaitu Bapak Wawan Darmawan, dilakukan pada 26 Juli 2019, dengan kesimpulan revisi Judul yaitu “*Desentralisasi di Daerah Aceh: 2005-2010*” dengan catatan untuk disetujui oleh Pembimbing I.

Proses bimbingan ini sangat berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. Dari proses bimbingan tersebut penulis banyak memperoleh pengetahuan mengenai penelitian ini baik dalam hal kekurangan maupun kelebihan dalam penelitian skripsi ini. Selama pelaksanaan bimbingan tidak ada masalah yang terlalu signifikan yang penulis alami.

### 3.3 Pelaksanaan Penelitian

Pada bagian pelaksanaan penelitian ini penulis akan menguraikan tahapan-tahapan yang dilakukan penulis ketika melaksanakan penelitian skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan empat tahapan penelitian yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Ismaun, 2005, hlm 48-50). Tahapan-tahapan dalam penelitian ini akan penulis jelaskan dalam beberapa sub bab.

#### 3.3.1 Heuristik

Langkah pertama yang dilakukan oleh penulis dalam memulai penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber atau didalam ilmu sejarah disebut heuristik. Sumber yang digunakan penulis ada sumber tertulis baik berupa buku, jurnal, buku elektronik (*e-book*), dan skripsi. Semua sumber yang penulis cari berkaitan dengan judul penelitian "*Otonomi Daerah Aceh: Sejarah dan Latar Belakangnya (1970-2005)*". Penulis mencari sumber penelitian ke berbagai perpustakaan, dan *repository* di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Adapun beberapa tempat yang penulis kunjungi adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia

Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia adalah tempat yang pertama kali penulis kunjungi karena dekat dengan tempat tinggal penulis. Di perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia penulis menemukan satu sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu buku karya Prof. Drs. HAW Widjaja yang berjudul "*Otonomi daerah dan Daerah Otonom*".

2. Perpustakaan Batoe API

Kunjungan ke Perpustakaan Batoe Api di Jatinangor Kabupaten Sumedang dilakukan pada bulan 16 November 2019. Di perpustakaan Batu Api penulis buku sumber karya Muhammad Effendy berjudul "*Membangun Kemandirian Daerah Melalui Otonomi Khusus*".

### 3. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat

Kunjungan ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat penulis lakukan pada 20 November 2019. Namun penulis tidak menemukan sumber yang relevan dengan penelitian penulis.

### 4. Internet

Selain berkunjung ke perpustakaan dan toko *on-line* penulis mencari sumber penelitian di internet. Dari internet penulis menemukan sumber Jurnal, Tesis dan Skripsi. Untuk Jurnal peneliti menemukan Jurnal yang membahas dan relevan dengan penelitian yang diteliti salah satu jurnal yang diterbitkan oleh kanal jurnal online yaitu *Jurnal Dinamika Hukum* peneliti mendapatkan fakta mengenai pelaksanaan syariat islam yang diatur dalam pemerintah serta kedudukan didalam pemerintahan. Selanjutnya penulis juga menemukan *Skripsi dan Tesis* yang membahas mengenai otonomi daerah Aceh. Selain itu penulis juga menemukan *e-book* yang membahas Mengenai Otonomi daerah yang ditulis oleh Syamsudin Haris yang berjudul *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Selain itu juga peneliti menemukan *E-book* yang di keluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang berjudul "*Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah*".

### 5. Koleksi Pribadi

Pada koleksi buku milik pribadi, penulis memiliki beberapa buku yang dapat dijadikan sebagai referensi. Buku-buku tersebut diantaranya:

- a. Buku yang berjudul "*Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*" Karya Sirajudin, M.H.
- b. Buku yang berjudul "*Mengelola Kewenangan Pemerintahan*" Karya Prof Dr. A. Kurtiwa, S.H., M.S. dan Dr Nugraha, S.E., M.si. Akt.
- c. Buku yang berjudul "*Dari Gunung Halimon Ke Swedia*" karya Dr. Husaini M. Hasan.

### 3.3.2 Kritik Sumber

Setelah penulis mengumpulkan berbagai sumber yang relevan selanjutnya penulis melakukan kritik sumber. Kritik sumber ini bertujuan untuk melakukan pengujian mengenai kebenaran dan ketepatan sumber yang digunakan (Sjamsuddin, 2012, hlm. 103). Sehingga sumber yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Ismaun (2005, hlm. 50) mengungkapkan bahwa “kritik sumber terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal. Adapun kritik eksternal dan internal yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

#### 3.3.2.1 Kritik Eksternal

Kritik eksternal yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi aspek luar sumber sejarah, apakah relevan atau tidak untuk digunakan dalam penelitian sejarah yang sedang dilakukan. Sjamsuddin (2012, hlm. 104) menyebutkan bahwa “...kritik eksternal merupakan cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah”. Apabila melakukan kritik eksternal pada sumber sejarah tertulis, seperti dokumen atau arsip, yang akan dilihat merupakan bentuk kertas yang digunakan, apakah benar kertas tersebut berasal dari tahun yang dimaksud, atau tinta yang digunakan, dan berbagai aspek luar lainnya. Pada tahap ini penulis melakukan pengujian otentisitas dan integritas sumber yang digunakan. Beberapa contoh sumber yang penulis lakukan kritik eksternal adalah *e-book* yang dikeluarkan oleh Jurnal Dinamika Hukum yang berjudul *Pelaksanaan Syariat Islam d Aceh Sebagai Bagain Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NRKI)* karya dari Syamsul Bahri. *E- book* yang dikeluarkan oleh kanal artikel situs online “*Dinmaika Jurunal Hukum*” ini penulis dapat katakan terpercaya dan bentuknya berupa soft file dalam bentuk word di *up-load* di situs yang dimana terdapat banyak jurnal ilmiah didalamnya. Penulis juga artikel ini adalah salah



satu dosen di perguruan tinggi terbaik di Aceh yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sehingga dengan alasan tersebut artikel berbentuk jurnal ini dapat dikatakan terpercaya dan bisa dijadikan sumber untuk penelitian skripsi ini. Sumber selanjutnya yang penulis lakukan kritik eksternal adalah buku karya Mohammad Effendy yang berjudul *Membangun Kemandirian Daerah Melalui Otonomi Khusus* yang dicetak tahun 2010 dan diterbitkan oleh Unpad Press.

Kritik yang penulis lakukan adalah menelusuri latar belakang Mohammad Effendy sebagai penulis buku. Setelah ditelusuri Mohammad Effendy bukanlah orang yang memiliki latar belakang pendidikan sejarah namun berlatar belakang hukum. Dan bukunya ini merupakan disertasi yang diajukan untuk memperoleh gelar dokter pada bidang hukum. Meskipun buku ini dikhususkan untuk bidang hukum, namun penulis berpendapat buku ini dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Alasan penulis menyatakan buku ini layak dijadikan sumber sejarah karena Mohammad Effendy dibukunya ini banyak menceritakan tentang sejarah bukan hanya sudut pandang hukum. Alasan lainnya adalah karena buku ini membahas mengenai Dinamika yang terjadi di Aceh dimulai dari perkembangannya, adanya Gerakan Aceh Merdeka dipaparkan dengan jelas hingga kesepakatan damai dengan adanya otonomi daerah didalamnya, ini sangat relevan dengan penelitian kripsi yang dilakukan oleh peneliti.

Sumber lainnya yang peneliti lakukan kritik eksternal adalah buku yang berjudul "*Mengelola Kewenangan Pemerintahan*" karya A. Kartiwa dan Nugraha yang dicetak pada April 2012 dan diterbitkan oleh Lapsindo. Kritik eksternal yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menelusuri latar belakang penulis. Prof. DR. A. Kartiwa, S.H., M.S. merupakan Dekan Fakultas Ilmu Politik di Universitas

Padjadjaran beliau juga menjadi salah satu orang guru besar termuda yang dimiliki UNPAD, yang memperoleh gelar prof pada usia 41 tahun, beliau juga aktif dalam menulis jurnal yang dimuat di situs kanal online Administrasi Publik UNPAD, tulisan beliau juga pernah dimuat di koran Pikiran Rakyat dengan judul “*Legislator Lupa Daratan*” pada tanggal 19 Juni 2004. selanjutnya Dr. Nugraha S.E M.Si Akt. Adalah Doktor Ilmu Administrasi/Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, beliau memperoleh dua gelar sarjana (S-1) dari dua perguruan tinggi berbeda: Sarjana Pendidikan Akuntansi dari IKIP Bandung (1989) dan Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Terbuka (2001), beliau tercatat aktif mengajar di Progam Doktor Ilmu Manajemen dan Universitas lainnya salah satu di Prodi Pendidikan Akuntansi dan Prodi Akuntansi UPI, beliau juga tercatat di *Google scholarship* sebagai penulis jurnal, salah satu jurnal yang dimuat berjudul “*Otonomi Daerah Papua*” Dengan banyaknya karya kedua penulis ini mengenai otonomi daerah penulis berpendapat bahwa penulis buku ini memiliki integritas dan karyanya layak dijadikan sumber rujukan.

### 3.3.2.2 Kritik Internal

Setelah penulis melakukan pengujian otentisitas dan integritas sumber (kritik eksternal) selanjutnya penulis melakukan kritik sumber internal. Kritik internal ini sebagaimana artinya adalah melakukan penyelidikan terhadap isi sumber sejarah (Sjamsuddin, 2012, hlm.112). Langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan kritik internal ialah dengan membandingkan kesaksian-kesaksian didalam sumber dengan kesaksian-kesaksian dari sumber lain (Ismaun, 2005, hlm.50).

Dalam hal ini peneliti mencoba mengkaji banding terhadap isi buku *Membangun Kemandirian Daerah Melalui*

*Otonomi Khusus* yang merupakan karya dari Muhammad Effendy yang berisi mengenai dinamika perkembangan Aceh dalam mendapatkan otonomi daerah, dalam buku tersebut dikupas mengenai perkembangan pemerintah Aceh beserta konflik yang terjadi hingga melahirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sampai perundingan antara pemerintahan Indonesia dengan GAM yang berakhir kesepakatan damai dan dilakukan *MoU* di Helsinki, buku ini juga mengupas dampak otonomi daerah pada aspek politik dan pengaturan pemerintahan, terdapat kewenangan pemerintah Aceh yang berbeda dengan daerah lainnya, seperti pengaturan yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah, pembentukan undang-undang, serta kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh harus dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan atau dengan Gubernur (Aceh).

Berbeda dengan daerah lain yang katup pengaman kepentingan daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), buku ini juga mengupas terdapat partai lokal dan ini menjadi pembeda yang sangat spesifik dengan daerah lain di Indonesia, Partai lokal ini adalah salah satu butir nota kesepahaman yang di sepakati bahwa di Aceh di perbolehkan membentuk dan mendirikan partai lokal, yang bertujuan untuk mengorganisir kembali kekuatan dari Gerakan Aceh Merdeka dan melakukan perjuangan melalui saluran politik konstitusional. Buku ini juga mengupas mengenai perangkat khusus yaitu *Mahkamah Syariah*, yang bertugas dan berwenang dalam bidang, *jinayah, muammalah, dan ahwal al-syakhshiyah*, di Aceh sendiri lembaga ini lebih dikenal dengan Polisi Syariah, lembaga selanjutnya ada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) anggotanay terdiri atas ualam dan cendikiawan muslim yang memahami ilmu agama islam.

Fungsi MPU ini sendiri adalah menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. MPU juga berfungsi memberikan arahan terhadap perbedaan yang ada di masyarakat berkaitan dengan masalah keagamaan

Buku yang kedua adalah *Mengelola Kewenangan Pemerintahan* karya Prof. Dr. A. Kartiwa, S.H, M.S dan Dr. Nugraha, S.E, M.Si, buku ini membahas sangat mendasar mengenai otonomi daerah dimulai dari ruang lingkup beserta konsep otonomi dan desentralisasi. Buku ini menitik beratkan pembahasannya pada pokok-pokok kewenangan mengenai otonomi daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bagaimana batas-batas kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat dijelaskan serta konsep, tujuan dan jenis dari kewenangan tersebut. Persoalan hubungan kewenangan dalam otonomi daerah sungguh krusial sehingga pada implementasinya tidak mudah.

Dalam sejarah otonomi daerah persoalan kewenangan akan senantiasa menjadi titik persoalan antara pemerintah daerah (*daerah otonom*) dengan pemerintah pusat. Akar atau sumber perselisihan itu tidak hanya soal besar kecilnya kewenangan yang diberikan tetapi justru ketika kewenangan itu diimplementasikan. Penyerahan kewenangan kepada daerah otonom akan membuka peluang dan kesempatan bagi aktor-aktor politik lokal dan sumber daya manusia untuk mengembangkan dirinya secara lebih baik. Begitu luas dan besarnya kewenangan daerah otonom menunjukkan sistem pemerintahan di Indonesia tidak hanya sangat demokratis tapi juga menempatkan rakyat sebagai pusat dan tujuan berpemerintahan.

### 3.3.3 Interpretasi

Setelah melakukan pengumpulan sumber dan menguji otentisitas dan integritasnya langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan interpretasi. Langkah-langkah yang dilakukan penulis pada tahap ini adalah mengolah, menyusun dan menafsirkan fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya melalui kritik sumber. Setelah fakta-fakta terkumpul dan diberi tafsiran penulis menghubungkan semuanya menjadi suatu rekonstruksi sejarah yang dapat dibaca. Sjamssuddin (2012, hlm. 123) mengungkapkan “Ketika sejarawan menulis, disadari atau tidak, diakui atau tidak, dinyatakan secara eksplisit atau implisit, mereka berpegang pada salah satu atau kombinasi beberapa filsafat sejarah tertentu yang menjadi dasar penafsirannya.

Penafsiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan filsafat sejarah deterministik. Filsafat sejarah deterministik menolak semua penyebab yang berdasarkan kebebasan manusia dalam menentukan dan mengambil keputusan atau dapat dikatakan semua perbuatan manusia ditentukan oleh kekuatan yang berada diluar dirinya. Filsafat sejarah deterministik ini memiliki beberapa bentuk. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penafsiran sintesis. Menurut penafsiran sintesis tidak ada sebab-sebab tunggal yang untuk menjelaskan semua fase dan periode perkembangan sejarah Barnes dalam (Sjamsuddin, 2012, hlm.132.). Alasan penulis menggunakan penafsiran sintesis karena dalam penelitian penulis yang berjudul “*Otonomi Daerah Aceh: Sejarah Dan Latar Belakangnya (1970-2005)*” memiliki beberapa faktor penggerak tidak tunggal. Beberapa faktor itu adalah:

Pertama, peristiwa politik. Perdebatan dan penolakan Aceh untuk bergabung dengan Negara Federal Sumatera dan sikap masyarakat Aceh yang ingin tetap menjadi bagian dari Negara Indonesia (Yogyakarta) inilah yang melatarbelakangi keluarnya peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintahan

No.8/Des/WKPM/1949 yang ditandatangani oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara tentang Pembentukan Provinsi Aceh, keputusan yang dilakukan tersebut adalah tindak lanjut dari janji Soekarno yang disampaikan saat berkunjung ke Aceh pada tanggal 15 Juni 1948, dalam pertemuan tersebut Soekarno berjanji bahwa nantinya Aceh akan diberikan hak menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat direalisasikan bahkan membuat situasi semakin tegang, hingga pemuka dan Tokoh masyarakat Aceh salah satunya Daud Beureueh mengirimkan surat bahwa jika sampai tanggal 1 Januari 1951 Aceh tidak diberikan hak otonomi sebagai Provinsi maka yang berdiri sendiri maka mereka akan mengambil sikap. Konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat baru dapat terselesaikan setelah tuntutan masyarakat Aceh dipenuhi yaitu dengan keluarnya UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh sekaligus mengubah Pembentukan Provinsi Sumatra Utara. Namun seiring bertambahnya waktu dan perkembangan rezim Orde Baru, Provinsi Aceh banyak di kecewakan, puncaknya adalah ditemukannya ladang gas yang depositnya diperkirakan mencapai 30 tahun, eksploitasi Sumber Daya Alam besar-besaran di Aceh tidak memberikan hal yang positif dalam menyejahterakan masyarakat Aceh karena semua keuntungan di kelola semua oleh pemerintah pusat hingga pada puncak kekecewaan masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat dengan di ubahnya UU No.18 Tahun 1965 diganti UU No.5 Tahun 1974, pengaturan ini membuat penyelenggara Pemerintahan Provinsi Aceh dengan segala keistimewaannya hamper sama dengan daerah lainnya

Kedua, faktor agama. Aceh tidak bisa di pisahkan dari syariat Islam. Boland, B.J. (1985, hlm 187) mengemukakan bahwa “Selama berabad-abad masyarakat Aceh telah memeluk agama Islam dengan sangat taat sehingga daerah ini diberi nama Serambi Mekkah” Islam mengilhami rakyat Aceh dalam perjuangan kemerdekaan menentang kolonialisme. Ini menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan

dinamika yang terjadi di Aceh.

### 3.3.4 Historiografi

Tahap terakhir dari metode historis adalah historiografi. Menurut Ismaun (2005, hlm. 28) historiografi adalah “usaha untuk mensistesisikan data-data dan fakta-fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan...”. Bersandar dari pengertian diatas pada tahap ini penulis akan berusaha mensintesisikan data-data dan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian ini dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca.

Pada tahapan penulisan sejarah ini penulis menyajikannya dengan gaya bahasa yang sederhana, lugas, ilmiah dan menggunakan penulisan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Sementara untuk teknik penulisan, penulis menggunakan sistem APA, sesuai dengan yang berlaku dan telah ditentukan dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI. Secara keseluruhan sistematika penulisan penelitian yang berjudul Kebijakan “*Otonomi Daerah Aceh: Sejarah Dan Latar Belakangnya (1970-2005)*”) tersusun menjadi lima bab. Struktur organisasi yang akan dibuat dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi. Dibagian latar belakang dijelaskan mengenai alasan penulis memilih topik yang akan diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya dirumusan masalah penulis merumuskannya menjadi poin-poin pertanyaan yang akan dijawab dalam bab IV. Kemudian penulis menjelaskan manfaat dari penelitian ini yang diarahkan kepada manfaat umumnya pada penulis sejarah dengan tema politik dan khususnya keapda manfaat dalam dunia pendidikan yaitu pembelajaran sejarah di sekolah.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis berusaha menjelaskan kajian-kajian terdahulu mengenai tema penelitian dengan, membandingkan persamaan dan perbedaan kajian-kajian terdahulu dan

penelitian penulis. Selain itu penulis juga menguraikan mengenai konsep dan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan penulis selama mengerjakan penelitian ini secara terperinci. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis yang berjudul "*Otonomi Daerah Aceh: Sejarah Dan Latar Belakangnya (1970-2005)*" adalah metode historis.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil temuan selama di lapangan. Peneliti menganalisis fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dan selanjutnya merekonstruksinya. Pada bab ini dijelaskan juga mengenai jawaban-jawaban pada pertanyaan rumusan masalah di bab I pendahuluan.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, dalam bab akan disajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis dan mengajukan rekomendasi hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian penulis. Selain itu pada bab ini akan diuraikan secara penjelasan secara singkat dari beberapa pertanyaan yang ada dirumusan masalah.